

SEJARAH SIMEULUE PADA MASA KOLONIAL

Usman, Mujiburrahman, Tamarli, Saifuddin

Universitas Abulyatama^{1,3,4}

Universitas Malikulsaleh²

usman@abulyatama.ac.id¹, mujiburrahman@unimal.ac.id², tamarli326@gmail.com³,

saifuddin@abulyatama.ac.id⁴

Abstract: *One of the important histories to examine is Simeulue in the Colonial Period. The purpose of the researcher is to bring back the historical events of Simeulue during the colonial period, for it is important that all people, especially the younger generation, are aware of history and they must preserve all of their ancestral heritage. This research method is to use the historical method, which consists of four stages, namely gathering sources (heuristics), source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study are that during the Dutch colonial period Simeulue had built inter-island sea transportation facilities in Simeulue. The Dutch Colonial Government also appointed 11 teachers in eight public schools on Simeulue Island, six people came from Simeulue Island, the rest were of Malay or Acehnese descent. Tax collections have increased, taxes have become the main regional income capable of financing postal refunds. Forced labor creates difficulties for the community such as carrying out socio-economic activities in meeting the needs of the family. The forced labor system is an obligation of the Simeulue people and is not intensive, but paroductive, and has an educational nature. Simeulue Island during the Dutch colonial period, the production of timber once raised Simeulue's good name in the eyes of the world, and even earned the title "Paris Van Sumatra. During the Dutch administration, the trade in copra including cloves in Simeulue was the main sector with export quality. Around March 1942 the Japanese army entered the island of Simeulue via the port of Sinabang, and established their command center in this city. Simeulue's government status is "gun" headed by "Guntyo" whose person is appointed from indigenous people (Simeulue).*

Keywords: *Dutch Colonial, Simeulue Government, Paris Van Sumatra*

Abstrak: *Salah satu sejarah penting untuk di teliti adalah Simeulue Pada Masa Kolonial. Adapun tujuan peneliti adalah mengangkat kembali peristiwa sejarah Simeulue pada masa kolonial, untuk penting diketahui semua kalangan, khususnya generasi muda sadar sejarah dan mereka harus melestarikan semua warisan leluhurnya. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah, yang terdiri atas empat tahap, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian adalah Simeulue pada masa kolonial Belanda sudah dibangun sarana transportasi laut antar pulau di Simeulue. Pemerintah Kolonial Belanda juga mengangkat 11 guru di delapan sekolah rakyat di Pulau Simeulue, enam orang berasal dari pulau Simeulue, sisanya adalah keturunan Melayu atau Aceh. Pungutan pajak mengalami peningkatan, pajak menjadi pendapatan utama daerah mampu membiayai pos restitusi. Kerja paksa menimbulkan kesulitan bagi masyarakat seperti melakukan kegiatan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan bagi keluarga. Sistem kerja paksa, kewajiban masyarakat Simeulue dan tidak bersifat intensif, tetapi paroduktif, serta memiliki*

sifat mendidik. Pulau Simeulue masa kolonial Belanda penghasil kayu pernah mengangkat nama baik Simeulue di mata dunia, bahkan mendapatkan gelar “Paris Van Sumatera. Pada masa pemerintahan Belanda perdagangan kopra termasuk cengkeh di Simeulue merupakan sektor unggulan berkualitas ekspor. Sekitar bulan Maret 1942 tentara Jepang memasuki pulau Simeulue melalui pelabuhan Sinabang, dan membentuk pusat komandonya di kota ini. Status pemerintahan Simeulue tersebut “gun” yang dikepalai oleh “Guntyo” yang personalnya diangkat dari masyarakat pribumi (Simeulue).

Kata Kunci: *Kolonial Belanda, Pemerintahan Simeulue, Paris Van Sumatera*

PENDAHULUAN

Sejarah merupakan aktivitas manusia dalam melaksanakan hidupnya di masyarakat. Ia berlangsung secara berkelanjutan, berdimensi waktu, ruang dan pelaku. Dengan kata lain sejarah adalah perbuatan manusia yang tindakan kejadian atau peristiwa. Ketika di jadikan objek pengamatan kejadian atau peristiwa tersebut telah lenyap dari pandangan. Ia merupakan aktualitas manusia yang hanya sekali terjadi dan lenyap bersama dengan lewatnya waktu untuk disusul dengan aktualitas lain tanpa pernah ada habisnya, selama pelakunya yaitu manusia terus eksis atau hidup.¹

Sejarah kisah adalah gambaran tentang aktualitas yang telah lenyap. Aktualitas yang telah tiada akibat ditelan masa, diusahakan untuk dapat bisa dihidupkan kembali meskipun dalam bentuk kisah yang tidak pernah sempurna/lengkap. Dengan membaca kisah orang kita ingin mengetahui aktualitas-aktualitas yang telah tiada lagi. Memahami/mengetahui aktualitas melalui kisahnya dimaksudkan untuk dapat mengambil hikmahnya. Suatu ungkapan yang sering diungkapkan orang “*bahwa kita harus belajar dari sejarah*” maksudnya agar kita belajar dari aktualitas tersebut supaya bisa mengambil manfaat yang akan dapat membuat orang berhati-hati. Lebih bijaksana atau tidak mengulang kesalahan seperti yang di anggap pernah di alami manusia di masa lampau.²

Dimensi waktu dalam sejarah sebagai aktualitas, semakin jelas adanya pergantian keadaan dari satu waktu ke waktu berikutnya, oleh karena itu sejarah sebagai aktualitas

¹ Rusdi Sufi, Irini Dewi Wanti, Seno, Djuniat (1: 1997); Penerbit Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

² Usman, Rusdhi Sufi (1: 2012): “*Simeulue Dalam Lintasan Sejarah*”, Laporan Penelitian kerjasama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

merupakan bagian dari proses alami itu sendiri. Proses dalam kehidupan di alam mengandung adanya perubahan, sebagai kisah sejarah yang disusun tidak akan bisa menggambarkan keadaan atau kejadian yang seutuhnya atau selengkapnyanya. Sejarawan/kita hanya mampu menggambarkan bagian-bagian yang dipandang penting, yang bermakna, meskipun selalu didasari keinginan yang besar untuk bisa mendekati keadaan sebenar-benarnya.

Sejarah sebagai aktualitas merupakan keutuhan dari semua aktivitas manusia, dalam arti mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Karena itu mestinya sejarah sebagai kisah merekonstruksi semua aktivitas manusia di luar kejadian atau peristiwa yang akan di rekonstruksikannya. Dengan demikian corak atau sifat dari hasil rekonstruksi itu akan sangat berpengaruh atau ditentukan oleh tujuan atau maksud penulis dalam bertindak. Mengisahkan semua kejadian atau peristiwa seperti yang pernah terjadi tidak mungkin dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian Simeulue Pada Masa Kolonial, maka peneliti mencoba menggambarkan kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi pada masa kolonial di Kota Sinabang secara tematis. Adapun gambarkan peristiwa sejarah kolonial adalah meliputi beberapa aspek, seperti aspek infrastruktur jalan dan sarana pengangkutan, pendidikan, perdagangan, pajak, dan sistem tanam paksa.³

Sinabang adalah sebuah kota kecil yang terdapat di Pulau Simeulue terletak di pesisir timur Simeulue. Kota ini merupakan ibukota Kabupaten Simeulue. Sejak tahun 1999, Simeulue menjadi Kabupaten. Perkembangan kabupaten Simeulue secara keseluruhan tergantung pada perkembangan Kota Sinabang Selain sebagai wilayah administratif, Sinabang juga merupakan pusat kegiatan Pulau Simeulue, setelah dilakukan perubahan status kewedanan menjadi Kabupaten, pertumbuhan dan perkembangan Kota Sinabang mengalami peningkatan.⁴

Kajian mengenai Simeulue dalam perjalanan sejarah masa kolonial menarik kembali untuk dikaji, untuk melihat berbagai kebijakan yang dilakukan kolonial Belanda dalam membangun kota Sinabang dengan program unggulan adalah perdagangan kayu, kopra,

³ Muhammad As'ad. " Kota Sinabang Studu Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah " Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, Laporan Penelitian, Banda Aceh. 1984

⁴ Kabupaten Simeulue - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

rotan, karet, pinang dan ternak menarik untuk di teliti. Untuk melihat produk unggulan masa kolonial dan dibandingkan dengan kondisi saat ini, tidak lagi menjadi bagian dari program unggulan pemerintah Simeulue yang pernah dikemas dan terjadi masa Kolonial Belanda di Kota Sinabang.

Berdasarkan paparkan di atas, penelitian Simeulue Pada Masa Kolonial menarik untuk di kaji. Sejarah Simeulue pada masa Kolonial ini akan menjadi pendorong bagi pemahaman tentang perjalanan panjang yang dilalui oleh Simeulue bersama masyarakatnya, masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia pada umumnya, selain itu kegiatan penelitian Sejarah Simeulue merupakan sebuah upaya penting dalam rangka pendokumentasian tentang sejarah sebuah Kota di Pulau Simeulue yang letaknya di lautan Samudera Hindia, serta diharapkan hasilnya nanti dapat di jadikan mata pelajaran muatan lokal bagi dunia pendidikan anak bangsa dalam rangka pembentukan jati diri dan karakter suatu bangsa. Untuk itu tidak berlebihan dikatakan bahwa kegiatan penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Penelitian Simeulue Pada Masa Kolonial sangat penting sebagai upaya pembentukan jati diri dan karakter masyarakat Sinabang sebagai salah satu kelompok sub etnis yang eksis di Provinsi Aceh dan siap menghadapi era global. Meskipun cara berfikir mereka yang lokal, tetapi harus bertindak global, sesuai zaman. Dalam penulisan tema-tema sejarah seringkali di batasi oleh ruang lingkup penulisan. Dalam hal ini menyangkut dengan ruang lingkup (*skope*) yaitu temporal dan spasial. Adapun *skope temporal* mendeskripsikan sejarah Simeulue Pada Masa Kolonial adalah sejak awal pendudukan Belanda hingga masuknya Jepang, sedangkan *skope spasial*, meliputi wilayah yang sekarang disebut sebagai wilayah Simeulue.

SUKU BANGSA SIMEULUE

a. Asal-Usul Suku Bangsa Simeulue

Asal-usul suku-bangsa Simeulue umumnya diketahui melalui cerita Lasenga. Berdasarkan mitos yang berkembang dikalangan masyarakat, pulau tempat pemukiman orang Simeulue dahulu bernama Pulau U (Pulau Kelapa), karena banyak ditumbuhi pohon

kelapa. Pada masa Kesultanan Iskandar Tsani, berdasarkan mitos tersebut, terjadi penculikan anak-anak dalam jumlah yang besar di pulau tersebut, untuk dijual sebagai budak kepada saudagar-saudagar di daratan Aceh. Salah seorang penculik tersebut bernama Songsangbulu, yang dikenal dengan sebutan Inolafu. Ia mencari mangsanya di sekitar teluk Simeulue sekarang, dan berhasil menculik seorang puteri yang bernama Simeulue. Karena kecantikannya, puteri tersebut diserahkan kepada Sultan, tinggal di keraton dan di-Islamkan. Dengan mengambil nama puteri ini, pulau tersebut kemudian diganti namanya menjadi Pulau Simeulue.

Penduduk asli Pulau Simeulue berasal dari luar pulau, kebanyakan dari Sumatera. Pertama, Pulau Simeulue ditemukan oleh sekelompok perantau yang berasal dari Sumatera Utara mereka yang menjadi penduduk pertama (lihat Leupia 1981:30)⁵, selanjutnya berdatangan kelompok lain, masing-masing membentuk suku/marga, dan pencampuran antara suku membentuk suku yang lain (suku baru), dikenal dengan suku Lasali (Fihau), Suku Lanteng (Chabu), Suku Dainang (Chabesi), Suku Dakwat, Suku Aceh, Suku Pamucak, Suku Pangulu, dan lain-lain.⁶

Hingga pada abad ke-14 kehidupan pulau Simeulue tidak banyak diketahui. Baru setelah abad 14 orang mulai berdatangan ke sana. Daerah asal mereka tidak diketahui secara pasti. Namun diperkirakan bahwa mereka datang dari daratan Pulau Sumatera. Ada dua rombongan yang tergolong sebagai pendatang pertama ke pulau tersebut. Pertama, rombongan yang dipimpin oleh Lasenga, menempati daratan Teupah, Simeulue Tengah, dan mereka dinamakan orang Lasali. Kedua, rombongan yang dipimpin oleh Lamborek, menempati daratan Salang, Sigulai (Simeulue Barat), dan Leukon. Mereka di panggil dengan sebutan Orang Lafung Lasal. Tahun-tahun berikutnya berdatangan pula ke sana orang Bugis. Pendatang dari Bugis ini mendiami Simeulue Barat dan Simeulue Tengah. Di Simeulue Barat mereka dinamakan orang Langteng, dan di Simeulue Tengah disebut orang Chabu. Berikut datang pula orang Aceh dari Pidie yang dikenal dengan sebutan Suku Dagang.

⁵ Muhammad As'ad. "Kota Sinabang Studu Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah" Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, Laporan Penelitian, Banda Aceh. 1984.

⁶ Muhammad As'ad. "Kota Sinabang Studu Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah" Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, Laporan Penelitian, Banda Aceh. 1984.

Asal-usul penduduk beraneka ragam menimbulkan kecorakragaman dalam bahasa. Namun dilihat dari kosa kata dan bentuk suku kata dapat dibedakan ke dalam dua bahasa daerah, yang keduanya disebut bahasa Pulau (Ulau). Pertama, bahasa Sigulai yang dipakai oleh penduduk Simeulue Barat, dan Salang. Kedua, Bahasa Defayan yang dipergunakan di Simeulue Timur, Simeulue Tengah, dan Teupah Selatan. Bahasa Sigulai menunjukkan banyak persamaan dengan bahasa Nias. Kecuali itu, di pulau Harapan, yang terletak diperbatasan antara Simeulue Barat dan Salang, dipergunakan bahasa Leukon. Bahasa ini hampir bersamaaan dengan bahasa Defayan. Untuk berkomunikasi dengan pendatang dari Sibolga, Tapak Tuan, Meulaboh, dan Padang, bahasa yang digunakan adalah bahasa jamu. Pemakaian bahasa Indonesia secara aktif boleh dikatakan masih terbatas pada sebagian penduduk umumnya laki-laki.

Munculnya pendatang dalam jumlah yang relatif besar di pulau Simeulue terutama disebabkan oleh alasan ekonomi. Tanahnya memberikan kemungkinan yang besar bagi penanaman cengkeh dan kelapa. Sejak dahulu pulau Simeulue terkenal sebagai penghasil cengkeh terbesar di daerah Aceh. Di samping untuk tinggal menetap, sebagian dari pendatang tersebut tinggal secara musiman (*temporary migration*). Kedatangan mereka bertujuan untuk bekerja sebagai buruh pemetik cengkeh atau sebagian sebagai pedagang. Bila pekerjaan memetik cengkeh telah berakhir, mereka kembali ke daerah asalnya, dan datang lagi pada musim cengkeh berikutnya. Begitu pula dengan pedagang, di musim panen cengkeh mereka berdatangan ke sana, baik untuk membeli cengkeh maupun untuk memperdagangkan barang-barang kebutuhan hidup lainnya.

Kecenderungan orang Simeulue untuk bermigrasi ke daerah lain terlihat kurang menonjol, yang relatif agak tinggi angka perpindahan penduduknya, adalah Simeulue Timur, Teupah selatan, dan Simeulue Barat. Perpindahan mereka umumnya ke kota-kota daratan Aceh, Padang, Medan dan Sibolga. Alasan perpindahan mereka yang terpenting adalah untuk mendapatkan pendidikan. Setelah selesai pendidikan, sebagian mereka kembali ke Simeulue menjadi pegawai negeri dan meneruskan pekerjaannya sebagai petani cengkeh. Kecenderungan untuk menetap di perantauan umumnya terbatas kepada mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan atau kedudukan tertentu.

Arus migrasi yang relatif tinggi ke Pulau Simeulue menimbulkan kesulitan dalam menentukan jumlah suku-suku bangsa asal yang bertempat tinggal di sana sekarang. Pengetahuan orang tentang jumlah suku-bangsa Simeulue umumnya terbatas pada Sensus Penduduk tahun 1930. Berdasarkan Sensus itu, jumlah penduduk Simeulue seluruhnya pada masa itu adalah sebanyak 17.997 orang, atau kira-kira jumlah orang Simeulue 1,84 % dari jumlah penduduk Aceh seluruhnya. Sedangkan menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Simeulue seluruhnya adalah sebanyak 80.279 jiwa, jumlah laki-laki 41.245 orang dan perempuan 39.034 orang, dengan kepadatan penduduk 38 orang per kilometer.⁷ dalam jumlah tersebut sudah termasuk pula mereka tergolong sebagai suku bangsa pendatang.

b. Kehidupan Sosial - Budaya

Masyarakat Simeulue menganut sistem Patrinal, hak dan kewajiban dipegang oleh satu kelompok, yang keanggotaannya diperhitungkan berdasarkan garis kekerabatan pihak laki-laki. Anak laki-laki meneruskan keturunan “wali dan suku ayah”.⁸ Wali dan suku merupakan konsep kekerabatan orang Simeulue. Konsep kekerabatan lainnya adalah *sao labu* yang memperlihatkan hubungan kekerabatan yang erat dan dekat.

Keluarga orang Simeulue bersifat verilokal. Keluarga batin senior tinggal bersama-sama keluarga batin junior dan merupakan satu kesatuan ekonomi. Kerabat yang sudah melewati beberapa generasi akan menjadi Wali. Hubungan dalam Wali lebih longgar, dibandingkan dengan *sao labu* (keluarga). Wali yang masih dipandang dekat hubungannya disebut Wali Hukum, sedangkan yang sudah jauh disebut Wali Adat. Wali Hukum masih tergolong sebagai ahli waris dan mempunyai wewenang dalam soal perkawinan dan keturunan.

Hubungan kekerabatan yang sudah sangat meluas dinamakan suku. Suku mempunyai tugas memberikan identitas pada para anggotanya, melindungi, dan mempertahankannya.

⁷ BPS Simeulue 2010

⁸ Adnan Abudullah. “*Kebudayaan Suku-Suku Bangsa Di Daerah Aceh*” Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala. 1994

Pada masa lalu setiap suku dikepalai oleh seorang Datuk, akan tetapi sekarang Datuk tidak dikenal lagi, karena kehidupan suku tidak lagi mengelompok pada tempat tertentu. Tugas Datuk adalah mengadili dan menyelesaikan perkara yang terjadi baik diantara sesama anggota suku maupun antar suku. Suku yang dipandang tertua diantara lain adalah Lasali, Dainang, Lanteng, dan Dakwat. Kelima suku tersebut berkembang dan melahirkan beberapa suku lainnya, seperti Dainang Dlok, Dainang Lamba, Pemucak Pedir Aceh, Pemucak 26, Pemucak 24, Pemucak Mudo, Manjungkan, Bihawo, Ballawa, Bangawan, Abesi, Chabu, Bangkulu dan Aceh.⁹

Upacara-upacara adat yang dilaksanakan dalam masyarakat Simeulue erat kaitannya dengan seni budaya yang ada. Pada cara pernikahan, khitanan, dan mendirikan rumah, turun anak, selalu diiringi oleh berbagai seni budaya. Beberapa jenis seni budaya di Simeulue antara lain nandong, debus, tonjon/rangkul dan nangga-nangga.

Kesenian Simeulue tersebut dirangkai dalam bahasa yang indah dan memukau, sehingga dapat merepleksikan aspirasinya lewat seni tersebut dalam bentuk nasihat, nasib, kekecewaan bahkan kritikan, kecuali debus. Seni debus memngambarkan keperkasaan orang Simeulue yang tahan godam atau kebal besi.

Pemilihan tempat tinggal setelah perkawinan umumnya dibedakan antara *marajalolo*, *paladangan satauan dua*, *malili-ilit*, dan *dangang te ulul*. Pada sistem *marajalolo*, keluarga baru tinggal dalam lingkungan laki-laki secara patrilokal. Sistem ini terutama dipraktekkan di Simeulue Tengah, *satauan dua*, *malili-ilit*, dan *dangang te ulul*. Pada sistem *marajalolo*, keluarga baru tinggal dalam lingkungan laki-laki secara patrilokal. Sistem ini terutama dipraktekkan di Simeulue Tengah. Berbeda dengan itu adalah sistem *pedalangan sataun duo*. Pada sistem ini keluarga baru tinggal dalam lingkungan keluarga perempuan selama satu atau dua tahun. Setelah itu mereka pindah ke lingkungan laki-laki untuk menetap seterusnya. Sistem ini terutama berlaku di Simeulue Timur. Sistem *malilit-ilit*, atau disebut juga *andam dumbio* menentukan bahwa keluarga baru itu bertempat tinggal selamanya dalam lingkungan perempuan secara matrilokal. Sedangkan pada sistem *dagang te ulul*, yang berlaku bila

⁹ Adnan Abudullah. "Kebudayaan Suku-Suku Bangsa Di Daerah Aceh" Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala. 1994

penganten laki-laki pendatang, serta isteri tidak boleh dibawa kemana-mana. Pada sistem dagang te ulul, segala biaya hidup ditanggung oleh pihak perempuan dan karenanya anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan se-walli dengan ibu.

Untuk membedakan urutan kelahiran dalam keluarga, dipakai sebutan atau gelar tertentu. Hal ini terutama berlaku untuk anak laki-laki. Dalam hal ini anak laki-laki yang pertama dipanggil *wo*, yang kedua *nga*, yang ketiga *nsu*, yang keempat *andung*, yang kelima dan seterusnya disebut *ibo*. Sedangkan untuk anak perempuan hanya digunakan panggilan kak *pe* untuk kakak, dan *endem* untuk adik. Anak laki-laki yang tertua menempati status sebagai pengganti ayah, yaitu sebagaimana diungkapkan dalam pepatah: *ansian baying-bayang aman*, yang berarti di jalan saudara laki-laki tertua yang menjadi ganti ayah.

c. Organisasi Politik Tradisional

Dalam sistem organisasi politik tradisional dikenal pembagian wilayah Simeulue atas lima *Banno* (daerah) yaitu: Teupah, Simeulue, Alang, Leukon, dan Sigulai. Masing-masing *banno* berdiri-sendiri, dan dipimpin langsung oleh Kepala Suku. Setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh, Kelima *Banno* tersebut dijadikan empat karajaan kecil, yaitu Teupah, Simeulue, Alang, dan Leukon. Raja yang dipimpinnya disebut *Bangulu*. Dalam melaksanakan tugasnya, *Bangulu* dibantu oleh kaum adat, kaum agama, dan orang-orang tua kampung. Akan tetapi ketika penjajahan Belanda dan Jepang, pembagian wilayah Simeulue berdasarkan *banno* pergunkan. Hanya status *banno* berganti menjadi *lanschap*, dan dipimpin oleh seorang *zelfbesturder*. Sebutan *lanschap* berganti menjadi *son* pada masa penjajahan Jepang, dan tiap *son* dipimpin oleh seorang *Suntjo*. Sesudah Indonesia Merdeka dan sejak pertengahan tahun enam puluhan, Pulau Simeulue di bagi dalam lima wilayah kecamatan, yaitu: Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Salang, dan Teupah Selatan. Masing-masing kecamatan tersebut dipimpin oleh seorang Camat dan pada struktur organisasi pemerintahannya terdapat Kepala Mukim, Kepala Desa, Tuha Peuet, dan Kepala RK (Rukun Kampung). Masing-masing jabatan tersebut dilengkapi dengan peralatan

kelembagaan lainnya, sebagaimana yang berlaku pada sistem organisasi politik pada suku-suku lainnya.¹⁰

Keadaan perekonomian masyarakat pada saat itu tidak banyak diketahui, hidupnya masih agak primitif, kehidupannya banyak bergantung pada hasil hutan, makanannya adalah ubi kayu (ubi-ubian).¹¹ Sistem pencariannya adalah ekonomi pengumpulan pangan, mereka berburu binatang, menangkap ikan dan mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan dan akar-akaran yang biasa dimakan.¹² Hubungan dagang dengan daerah tepi (daratan Sumatera) sudah ada tetapi masih sangat terbatas pada hasil hutan seperti getah daun. Sistem perdagangan pada waktu itu adalah pertukaran barang (*barter*). Islam berkembang di Simeulue atas usaha Tengku Kalilullah pada awal abad 17 penduduk yang sebelumnya hidup bersuku-suku terikat dalam suatu ikatan keyakinan (Islam). Untuk menjamin kehidupan yang teratur dan damai dibantu kerajaan-kerajaan yang berdasar Bano (daerah) seperti telah diuraikan di atas tadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, yang terdiri atas empat tahap, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, tahap interpretasi, dan historiografi. Dalam rangka mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan tema penelitian tim peneliti akan melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu pertama studi kepustakaan dan berkunjung ke Simeulue di lacak pada beberapa tempat¹³, yaitu :

1. Banda Aceh

Peneliti melakukan pelacakan untuk mendapatkan sumber-sumber berupa buku-buku, foto dan naskah pada beberapa tempat seperti, Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Perpustakaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Perpustakaan Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh,

¹⁰ Adnan Abudullah. “*Kebudayaan Suku-Suku Bangsa Di Daerah Aceh*” Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala. 1994

¹¹ Muhammad As’ad “*Kota Sinabang Studi Tantang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah*” Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Banda Aceh 1984.

¹² Koentjaraningrat, 1984. “*Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*” Gramedia, Jakarta.

¹³ Wulan Juliani Sukmana, “*Metode Penelitian Sejarah*”. Seri Publikasi Pembelajaran Vol 1 No 2(2021): Metode Penelitian, Hal 2.

Perpustakaan Museum Negeri Provinsi Aceh dan yang terakhir pada Perpustakaan Ali Hasjmy.

2. Kabupaten Simeulue

Peneliti melakukan kunjungan beberapa tempat di Simeulue yang pernah diduga merupakan sisa-sisa dari/proses peninggalan masa kolonial. Sejumlah arsip-arsip dan buku-buku serta artikel-artikel yang berhasil di kumpullkan akan di cantumkan pada bahagian bibliografi/daftar kepustakaan. Dalam kegiatan penelitian lapangan, peneliti juga akan melakukan sejumlah wawancara dengan beberapa tokoh/pelaku sejarah, yang dianggap mengetahui tentang sejarah Simeulue Masa Kolonial guna mendapat keterangan yang lebih terperinci.

Peneliti berhasil mengumpulkan sejumlah sumber, maka diadakan penilaian terhadap sumber-sumber itu berdasarkan kritik sumber yang lazim digunakan dalam suatu penelitian sejarah. Kritik sumber ini dilakukan baik secara interen maupun secara eksteren. Peneliti juga melaksanakan serangkaian diskusi sehingga keraguan terhadap kebenaran sumber-sumber yang ada dapat di hilangkan sejauh yang dapat dicapai. Selanjutnya peneliti melakukan proses interprestasi, penafsiran terhadap fakta-fakta, perumusan dan penyelesaian fakta-fakta agar kemudian dapat di sintesakan atau dirangkaikan dalam bentuk laporan penelitian/historiografi.

HASIL PENELITIAN

Masa Kolonial Belanda

Peneliti memastikan bahwa Kolonial Belanda menginjakan kaki ke Pulau Simeulue adalah pada tahun 1901. Awalnya penelusuran peneliti sesuai dengan hasil wawancara menyebutkan bahwa Pada tanggal 1 Agustus 1900 raja-raja dari Simeulue menyepakati perjanjian setia kepada pemerintah Belanda bertempat di Tapak Tuan dan selanjutnya pada tahun 1903, Kolonial Belanda mengirim pasukan ke Sinabang, untuk mengawasi jalannya semua pemerintahan dibawah kendali pemerintah Kolonial Belanda, dan pada bulam Maret 1912 baru terbentuk *onderafdeeling* Simeulue yang dikepalai oleh *Controleur* berkedudukan di Sinabang.

Dari beberapa sumber melalui wawancara, peneliti menemukan bahwa kerajaan yang ada di Pulau Simeulue sepakat menerima kedatangan Belanda tanpa perlawanan. Namun perlakuan serdadu Kolonial Belanda banyak menimbulkan dendam segenap penduduk sehingga meletus peristiwa pada tanggal 7 September 1904 beberapa orang penduduk menyerbu kubu serdadu Belanda di Sinabang dan membunuh beberapa orang serdadu dan merampas senjata serta melarikan diri keluar dari Sinabang, penyerbuan ini di pimpin oleh *Datuk Mat Sen* (Datuk Muhammad Zain). Kemudian pada tahun 1913 sekelompok penduduk membulatkan tekad untuk menyerbu kedudukan pemerintah Belanda di Sinabang di bawah pimpinan yang bernama Panglima Daim.¹⁴

Pulau Simeulue dibawah kolonial Belanda merupakan salah satu bagian *afdeling wetkust van Aceh*, yang populer dengan sebutan *Onder afdelling Simeulue*. Saat itu dipimpin oleh seorang *Controleur* dan dibagi menjadi lima *landschap* yaitu, Sinabang ibu negerinya Sinabang, *landschap* Simeulue ibu negerinya Pulau Ie, *landschap* Salang ibu negerinya Nasrehe, *landschap* Lekon ibu negerinya Lekon, dan *landschap* Sigulai ibu negerinya Lamamek. Masing-masing *landschap* dikepalai oleh seorang *Zelfbestuurder*. Kelima kerajaan kecil berotonom tersebut dipimpin oleh putra daerah yang di tunjuk oleh Belanda, tetapi secara hirarkhi tunduk kepada *Controrleur* Belanda. Yang merupakan inspektorat pemerintahan pada *landschap-landschap* terutama kegiatan politik dan pemugutan pajak dari rakyat.¹⁵

Peneliti melalui wawancara menemukan fakta bahwa raja-raja di Simeulue mempunyai wewenang dalam mengatur daerahnya, mengadili perkara ringan hukumnya kurang dari satu tahun selama, tidak bertentangan dengan undang-undang Belanda, sedangkan keamanan dan pengelolaan keuangan daerah serta penggunaannya berada di tangan *Controleuer*.¹⁶ Sebelum kedatangan Belanda di Simeulue kerajaan Teupah berpusat di Lasikin, setelah Belanda datang, Sinabang dibangun dan pusat pemerintahan Landschap

¹⁴ Muhammad As'ad " Kota Sinabang Studi Tantang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah" Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Banda Aceh 1984.

¹⁵ Abdul Rani Usman dkk, " Budaya Aceh " Dinas Kebudayaan dan Parawisata Pemerintah Aceh. 2009.

¹⁶ Muhammad As'ad " Kota Sinabang Studi Tantang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah" Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Banda Aceh 1984.

awalnya diteupah di pindahkan ke Sinabang Simeulue Timur. Sinabang sebelum datangnya Belanda hanya kampung yang sedikit penduduknya, seperti yang ditulis oleh *Van Lagen* dalam laporannya pada tanggal 25 Maret 1881 bahwa di desa Sinabang terdapat 15 rumah dengan jumlah penduduk 90 jiwa. Pembukaan pelabuhan Sinabang oleh Belanda menyebabkan perdagangan antara pulau semakin baik, bahkan hubungan dagang dengan luar negeri terjalin, seperti Penang (Malaysia). Komoditi perdagangan antar pulau pada saat itu bermacam-macam antara lain kayu, rotan, kopra, karet, pinang, dan ternak.

a. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sarana Pengangkutan

Pulau Simeulue sangat minim jalan pada saat itu, lalu lintas sebagian besar dilakukan dengan perahu melalui laut. Transpotasi laut menjadi andalan satu-satunya sarana pengangkutan yang menghubungkan kota Sinabang. Di mulailah tahap awal pembuatan jalan dilakukan oleh pemerintah Belanda dari Sinabang ke desa Ai. Pembuatan jalan ini terhambat dengan adanya empat punggung bukit terjal di daerah Teupah dan melewati Maoedali.¹⁷

Pengalihan dua punggung bukit pertama, gunung Inor dan gunung Naibos dapat diselesaikan. Namun pembuatan badan jalan melalui gunung Batoe Roendong terkendala, karena tanah yang harus disingkirkan kurang lebih 175.000. Kemudian penggalian dari bukit yang lebih kecil (gunung Boenong) dekat perbatasan Teupah dan Simeuleu. Berhasilnya pembagunan jalan darat tersebut membuka isolasi masyarakat di daerah Teupah, Salang dan Leukon yang terletak di pantai Barat, menjadikan hubungan darat yang murah untuk membawa hasil-hasil mereka ke pelabuhan Sinabang. Terutama yang sangat penting, hasil perkebunan pinang dan cengkeh yang mulai berproduksi¹⁸.

Jalan Sinabang-Saloel (lebih kurang 26 KM), yang dikeraskan hingga Lassihing (lebih kurang 11 KM), sudah dapat bisa dilalui oleh kendaraan. Bagian pengerasan ini melewati daerah rawa-rawa. Pengerasan jalan terhalang dengan material, semua material, serta kerikil harus diangkut dari Sinabang. Karena daerah ini tidak memiliki truk, maka pengangkutan harus dilakukan dengan menggunakan gerobak, yang mengakibatkan semakin

¹⁷ Muhammad As'ad " Kota Sinabang Studi Tantang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah" Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Banda Aceh 1984

¹⁸ Usman, Rusdhi Sufi (1 : 2012): "Simeulue Dalam Lintasan Sejarah", Laporan Penerlitan kerjasama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Hal 36

jauh jarak dari tempat pekerjaan dengan material diambil, mengakibatkan tidak cepat selesai dan mahal. Disamping hubungan darat ini masih ada beberapa jalan setapak di pulau ini. Jalan-jalan kecil ini yang dipelihara oleh pemerintah daerah (Belanda), yang berada sepanjang pantai dan belum dapat dilalui gerobak¹⁹, adalah :

- Desa Ai - Salang 8 Km
- Salang - ujung Salang 22 KM
- Leukon - Langi 24 KM
- Lho Pau - Lewa 14 Km
- Sangiran - Babang sibigo 14 KM
- Malasin - Lajambung 22KM

Pada masa Kolonial Belanda di Sinabang terdapat 3 bus, serta 1 truk. Kendaraan ini terutama digunakan untuk pengangkutan kopra untuk trayek Salul- Sinabang, dan kadang - kadang untuk pengangkutan penumpang. Jumlah perahu yang lebih besar diperkirakan 150 buah. Pelayaran perahu ke tanah seberang atau tempat lain tidak dilakukan. Selanjutnya disini ditempatkan kapal pemerintah Kolonial Belanda, yang disediakan untuk Simeuleu dan Singkil. Disamping itu sebuah pemilik Konsesi dari kepulauan memiliki satu kapal motor, yang digunakan untuk mengangkut kopra dari pulau-pulau ke Sinabang.

b. Pendidikan

Sinabang terdapat sekolah lanjutan pemerintah dengan satu guru. Sekolah rakyat di daerah pada saat ini terdapat di daerah Teupah di Sinabang, Lataling, Labuan baju, Lasihing dan Awe Sebal, di daerah Simeulue di desa Ai dan Kota Padang dan di daerah Sigulai di Lamameh. Sekolah-sekolah di Lassihing dan Lataling dirobohkan dan dibangun yang baru. Gedung sekolah rusak direnovasi dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya, karena kurangnya anggaran. Seperti pembangunan gedung sekolah di desa Ai dihentikan. Sekolah rakyat ini terpaksa dipindahkan untuk sementara ditampung di rumah wakil kepala desa Ai.

Keseluruhan tingkat partisipasi siswa cukup baik, paling baik partisipasi dan minat belajar adalah sekolah rakyat di Sinabang dan desa Ai, Awe Sebal dan Lamamek. Pemerintah

¹⁹ Muhammad As'ad " Kota Sinabang Studi Tantang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah " Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Banda Aceh 1984

Kolonial Belanda mengangkat 11 guru delapan sekolah rakyat di Pulau Simeulue, enam orang berasal dari pulau Simeulue, sisanya adalah keturunan melayu atau Aceh. Uang sekolah untuk sekolah rakyat sejak 1933 ditetapkan sebagai berikut :

Biaya Sekolah Rakyat Tahun 1933 di Pulau Siemeulue

Pungutan pajak pertama		Uang sekolah untuk anak
	F.3, - atau kurang pertahun	F.0.025.-
Lebih dari	F.3.- Sampai F.5 – Per tahun	F.0.05.-
Lebihdari	F.5,- Sampai F.8,-per tahun	F.0.10.-
Lebih dari	F.8,-Sampai F.11,-Pertahun	F.0.15.-
Lebih dari	F.11--	F.0.25.-

Anak kedua membayar setengah dari uang sekolah anak pertama, yang ketiga setengahnya uang sekolah anak yang kedua dan seterusnya. Selanjutnya catatan akhir jumlah anak dari berbagai sekolah rakyat tanggal 1 Januari tahun 1933 adalah:

Jumlah Siswa Sekolah Rakyat Tahun 1933

Nama Sekolah	Jumlah Siswa
Sekolah rakyat Sinabang	184
Sekolah rakyat Lasihin	57
Sekolah rakyat Awe Sebal	38
Sekolah rakyat Lataling	43
Sekolah rakyat Labun Baju	43
Sekolah rakyat Lamamek	71
Sekolah rakyat Kota Padang	95
Sekolah rakyat Desa Ai	159
Jumlah	690

c. Perdagangan Kayu, Kopro, Rotan, Karet, Pinang dan Ternak (Kerbau)

Penghasilan kayu pernah mengangkat nama baik Simeulue di mata dunia, bahkan mendapatkan gelar “*Paris Van Sumatera*” Sebelum Medan mendapat gelar serupa.²⁰ Pada tahun 1907 berdiri perusahaan Pengolahan kayu di Sibogo, Simeulue Barat, dan sekitar tahun 1910 pindah ke Sinabang. Pembukaan pelabuhan Sinabang oleh Belanda menyebabkan perdagangan antar pulau semakin baik, bahkan hubungan dangang dengan luar negeri terjalin, seperti dengan Penang (Malaysia). Komoditi perdagangan yang diantar-pulaukan pada saat itu bermacam-macam antara lain kayu, rotan, kopra, pinang, karet, dan ternak (kerbau).

Puncak perdangan Simeulue adalah pada saat pengelohan kayu di tangani oleh *Vereenigde Indische Boschexploitatie Matschapijen* (VIBEM) sejak tahun 1917. Perusahaan ini mendatangkan mesin-mesin yang besar sehingga pada saat itu termasuk perusahaan kayu nomor satu di Asia. Hasil pengolahannya di ekspor sampai ke Eropa, pada saat itu keadaan sosial ekonomi cukup baik, fasilitas kesejahteraan cukup, terdapat tempat hiburan (bioskop) dan rumah sakit yang besar untuk saat itu, mempunyai perlengkapan pembedahan demikian pula penerangan listrik. Selain itu hubungan komunikasi dengan Tapak Tuan sudah ada, fasilitas-fasilitas ini disediakan oleh *corporate* (perusahaan) dan masyarakat umum juga ikut menikmatinya.

Pada waktu perusahaan ini berada pada puncak kemajuan, penduduk Sinabang masih sedikit, tetapi cukup ramai karena maskapai mempunyai buruh ribuan jumlahnya, mereka didatangkan dari luar pulau, utamanya dari Jawa sebagai buruh kontrak. Pada waktu itu kota Sinabang terbagi dua, sebagian merupakan pemukiman penduduk dan bangunan pemerintah dan sebagian yang lain daerah maskapai dengan bangunan-bangunan yang besar. Selain dari buruh kontrakan, penduduk setempat dapat juga bekerja, tetapi hanya tenaga harian, salah satu sebabnya adalah permintaan dari raja sendiri, ia khawatir jika suatu saat perusahaan

²⁰ Muhammad As'ad “*Kota Sinabang Studi Tantang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah*” Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Banda Aceh 1984.

pindah tentu tenaga kontrak itu ikut pindah, penduduk Simeulue yang kurang akan bertambah kurang lagi.

Perusahaan pengolahan kayu ini berpindah tangan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan dengan perpindahan itu perusahaan bukan semakin maju bahkan sebaliknya, dan pada tahun 1928 kejayaan perusahaan yang merupakan kejayaan Simeulue juga berakhir dengan terbakarnya induk pabrik pengolahan kayu, dan fasilitas kesejahteraan masyarakat seperti listrik ikut musnah dan kota Sinabang kembali gelap. Setelah kebakaran itu perusahaan pengolahan kayu di Sinabang hanya secara kecil - kecilan di banding sebelumnya akan tetapi masih mengekspor kayu, terakhir perusahaan yang mengolahnya bernama Djin Hoat (perusahaan cina) yang berpusat di Medan. Selain dari kayu, Simeulue juga menghasilkan rotan karena hutannya yang subur banyak di tumbuhi oleh rotan, berupa rotan saga (kecil) dan rotan manau (besar). Perdagangan rotan yang menonjol saat itu terutama jenis rotan saga yang diantar pulaukan seperti ke Medan.

Hasil pertanian yang menjadi komoditi perdagangan terkenal pada masa itu adalah kopra. Seperti telah dikemukakan bahwa tanaman kelapa sudah di kenal masyarakat sebelum kedatangan Belanda di Simeulue, dan pada masa Belanda penanaman kelapa digiatkan, perusahaan yang mengolah kayu juga mengadakan usaha perkebunan kelapa di beberapa tempat seperti di pulau Panjang, pulau Lasia, pulau Babi dan lain-lain, semua ini termasuk wilayah Simeulue.

Pada tahun 1916 datang sebuah perusahaan dagang Belanda (Haramsen) membawa bibit kelapa dari Tojolawa kemudian diperbesar luaskan oleh penduduk, mula-mula di Simeulue Timur (*Landschap* Teupah) dan Simeulue Barat (*Landschap* Leukon dan Sigulai). Dan pada tahun 1917 s/d 1919 dimulai penanaman kelapa yang berasal dari Lhok Krut sekarang Kabupaten Aceh Jaya di pulau-pulau Panjang dan Seulaut (Badan Perencana Pembangunan Aceh dan 1970 : 87). Pada masa pemerintahan Belanda perdagangan kopra di Simeulue baik sekali, kopra menjadi sumber penghasilan yang menonjol, perdagangannya berskala internasional, kopra di ekspor ke Penang (Malaysia). Ekspor kopra yang di tulis ke kota dalam bukunya "*Het Ieland Simeulue*" pada tahun 28 September 1938 yang dicatat oleh informan sebagai berikut (lihat table). Keadaan perdagangan kopra yang baik itu berlangsung

sampai meletusnya Perang Dunia II, utamanya pada masa perang Asia Timur Raya. Sejak itu eksport kopra berhenti karena situasi keamanan tidak mendukungnya.

Tabel : Eksport kopra dari Sinabang 1931 – 1937

Tahun	Jumlah (kg)
1931	2.348.804
1932	2.576.034
1933	2.213.734
1934	2.360.775
1935	2.465.071
1936	2.386.109
1937	2.470.708
Jumlah	16.821.235

Raja-raja atau penguasa pada masa Belanda berlaku tegas kepada rakyatnya untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat, mereka di perintahkan bertani, baik pertanian pangan maupun pertanian perkebunan, mereka tidak di biarkan tinggal berpangku tangan, orang-orang yang suka bermalas-malasan akan di hukum atau didenda. Pada saat itu penguasa menerapkan satu kebijakan atau peraturan lokal guna memberi dorongan kepada rakyatnya untuk niat bekerja. Seorang pemuda tidak dibenarkan untuk kawin sebelum memenuhi syarat minimal tertentu yaitu mempunyai sejumlah usaha/tanaman seperti kelapa, pinang dan tanaman lainnya.

Sejak tahun 1922 penanaman karet di galakkan atas perintah penguasa. Bibit karet sengaja di datangkan dari Meeloboh dan Sibolga melalui maskapai pengolahan kayu di kota Sinabang, dan perluasan penanaman karet secara besar-besaran dilakukan pada tahun 1934. Usaha perkebunan ini cukup berhasil, sebelum perang dunia II hasil karet di antar pulaukan ke Padang dan Sibolga, bahkan di ekspor ke Penang (Malaysia)²¹. Selain dari itu pinangpun sengaja ditanam dan merupakan juga komoditi perdagangan yang baik, dapat menambah

²¹ Badan Perencanaan Pembangunan Aceh dan P4BS 1970 : 87

pendapatan petani, semua ini tentu disebabkan oleh kesuburan tanah di Simeulue dan cocok untuk berbagai tanaman.

Pada masa Belanda ini komoditi cengkeh belum dikenal penduduk secara menyeluruh, dan belum menarik perhatian petani untuk menanamnya karena belum mengetahui persis kegunaannya, dan harga pemasarannya belum ada di daerah itu. Namun demikian usaha penanamannya sudah dimulai atas rintisan orang-orang tertentu (raja-raja) seperti Sultan Amin (raja Teupah) di Sinabang (1924) dan Tengku Raja Mahmud (raja Simeulue) di kampung air (1936). Kemudian pada tahun 1939 dimulai penanamannya di Simeulue Barat.²²

Pertanian padi pada masa ini betul-betul mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Pada suatu waktu controlaur Belanda mengundang tokoh-tokoh masyarakat serta orang-orang pintar dari seluruh Simeulue untuk bermusyawarah membicarakan permasalahan pertanian padi, bagaimana cara yang baik dan kapan waktu yang cocok untuk turun ke sawah. Keputusan - keputusan yang diambil dalam musyawarah ini harus di jalankan oleh penduduk setiap *landschap* masing - masing *zelfbestuurder* harus memberikan bimbingan dan pengawasan. Pertanian padi di lakukan oleh penduduk secara tradisional sekali, tanah pertanian diolah dengan mempergunakan kerbau, serombongan kerbau di kumpulkan di atas sawah yang mau diolah untuk menginjak-injaknya (dirancah) sampai rumputnya hancur, kemudian di rendam dengan air beberapa malam sampai membusuk (mati) lau di Tanami.

Setiap akan turun ke sawah, penduduk kampung mengadakan musyawarah untuk turun sawah tahun itu berdasarkan perhitungan lintang yang menurut mereka erat kaitannya dengan hujan dan hama padi. Hasil musyawarah ini harus dilaksanakan oleh petani secara serentak. Selain dari hasil hutan dan pertanian, Simeulue juga menghasilkan ternak (kerbau). Pertenakan kerbau di lakukan secara tradisional, yaitu dengan melepaskannya di hutan-hutan bebas tanpa di gembala/dipelihara, dan hanya di lihat sekali-sekali untuk memberi tanda bila ada yang baru lahir. Setiap peternak memberikan tanda pada ternaknya berbeda dengan yang

²² Badan Perencanaan Pembangunan Aceh dan T4BS 1970 : 87, dan perasat 1983 : 19

lain, agar tidak terjadi pertukaran/percampuran, dengan demikian sekalipun kerbau itu berkumpul pada satu tempat, masing-masing peternak dapat mengetahui ternaknya berdasarkan tanda yang di capkan padanya. Perdagangan kerbau saat itu dengan mengantar pulaukan lewat Sinabang, kerbau dibawa ketepi (daratan Sumatera) seperti Padang dan Sibolga.

d. Keadaan Keuangan, Pajak Dan Kerja Paksa

Keadaan kas Daerah Otonom Pulau Simeulue sangat jauh dari baik. Sumbangan dari daerah ini sepanjang tahun 1935-1937 adalah masing-masing F.36100,- F.35800,- dan D.31.595., sedangkan pos-restitusi pada tahun tersebut masing-masing F.36862, F.36856 dan F.3856. Pada tahun ini sumbangannya adalah F.36.600 dan pos-restitusi F.41.323. Keadaan kas keuangan untuk sementara tidak ada peningkatan yang berarti, meskipun dalam pungutan pajak mengalami peningkatan, biarpun pada saat pembayaran ada keterlambatan. Namun pada tahun selanjutnya pendapatan utama daerah adalah dari pajak, sehingga mampu membiayai pos restitusi. Sebagai gambaran hasil pungutan pajak tidak mampu menutupi kas daerah akibat terjadinya krisis pendapatan rakyat, berikut ini dijelaskan daftar pengenaan pajak untuk kepulauan Simeulue tahun 1925 – 1938.²³

Penghasilan Pajak Simeulue Tahun 1925-1938

Tahun	Jumlah Penghasilan Pajak
1925	F.20.875,60
1926	D.22.589,92
1927	F.23.402,22
1928	F.24.850, 70
1929	F.27.582., 80
1930	F.28.106,05
1931	F.27.019,96
1932	F.26.913,72
1933	F.20.623,19

²³ Muhammad As'ad "Kota Sinabang Studi Tantang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah" Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Banda Aceh 1984.

1934	F.14,500,00
1935	F.15.707,50
1936	F.15.327,50
1937	F.21.811,95
1938	F.25.285,20.-

Pada saat itu penguasa daerah otonom membayar pajak pendapatan berdasarkan peraturan pemerintah otonom tanggal 1 Mei 1933, yang disetujui oleh pemerintah Belanda pada tanggal 1 Juni 1933. Pemungutan pajak rata-rata bagi wajib pajak pada tahun 1937-1938, masing-masing F.4.- dan F.5.-. Pada tanggal 16 September 1938 untuk masing-masing wajib pajak harus membayar 10%, 15%, 12%, dan 9%, pada tanggal tersebut baru 79 % telah dibayar. Disamping pajak pendapatan yang harus dibayar oleh bawahan penguasa otonom, ada juga pajak sepeda, pajak pemotongan hewan dan senjata api, di kota Sinabang juga berlaku pajak anjing.

Adanya pengawasan yang baik atas jalan-jalan tahun 1937 telah meningkatkan pendapatan pajak sepeda, seperti tersebut dibawah ini²⁴:

Pendapatan dari Pajak Sepeda di Seumelue (Tahun 1935-1938)

Tahun	Pendapatan Dari Pajak Sepeda
1935	F.30.-
1936	F.44.-
1937	F.131.-
1 Januari- 15 September 1938	F.143.-

²⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Aceh dan T4BS 1970 : 87, dan perasat 1983 : 19

Kewajiban membayar pajak untuk pegawai sipil diatur pada catatan berita Negara tahun 1932, No111,- perubahan terakhir dengan berita Negara tahun 1937 No.504, serta pajak gaji pada catatan berita Negara tahun 1934 No.611, terakhir diubah dalam berita Negara tahun 1937 No.503. Selanjutnya mereka juga membayar pajak pegawai sesuai catatan dalam berita Negara tahun 1908 No.,13.- Keharusan kerja paksa di Pulau Simeulue menimbulkan kesulitan bagi masyarakat khususnya kesulitan untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga. Bahwa sistem kerja ini, menjadi kewajiban bagi masyarakat dan tidak hanya harus bersifat intensif, tetapi juga produktif, serta memiliki sifat mendidik.

Namun dalam pelaksanaan kerja paksa ini tidak berjalan sesuai dengan yang di rencana, ada beberapa daerah sudah dilaksanakan kerja paksa selama 15 hari namun mendapatkan kendala, secara intensif dan produktif mengecewakan, karena daerah-daerah tersebut setelah pekerjaan diselesaikan namun kerja paksa tersebut bagi bersangkutan (masyarakat), hanya sebagai suatu formalitas saja. Seperti kejadian di kelurahan Salang, Leuken, dan Sigoelei yang mengakibatkan kerja rodi tersebut, dianggap sebagai sesuatu yang berat dibanding kerja wajib di daerah lain. Karena dalam pelaksanaan dilapangan banyak masyarakat untuk memenuhi kerja paksa mereka mengantikan dirinya dengan membayar orang lain. Sehingga pekerjaan yang awalnya menjadi target produktif namun pada kenyataan tidak menghasilkan apa-apa atau gagal. Berikut ini daftar penghasilan penjualan kerja paksa.

Penghasilan Penjualan Kerja Wajib

Tahun	Teupah dan Simeulue	Leukon,Salang dan Sigoelei	Jumlah Penghasilan Daerah Otonom
1936	F.3546.-	F.6.-	F.3552.-
1937	F.4305.-	F.25.50.-	F.4330.50.-

Untuk keadaan yang kacau tersebut diatas dan sedapat mungkin mengurangi tekanan dari kerja wajib di daerah ini, maka dilakukan peraturan kerja wajib yang ada, untuk

membuka kemungkinan hal - hal tertentu, setelah mendapat persetujuan dari wakil pemerintah Belanda terlebih dahulu, agar kerja wajib dapat dijalankan dengan baik dan juga bisa diterapkan di daerah lain.

e. Simeulue Pada Masa Pendudukan Jepang

Sistem pemerintahan di Simeulue pada masa Jepang tidak jauh beda dengan pada masa pemerintahan Belanda. Sekitar bulan Maret 1942 tentara Jepang memasuki pulau Simeulue melalui pelabuhan Sinabang, dan membentuk pusat komandonya di kota ini. Status pemerintahan Simeulue tersebut “gun” yang dikepalai oleh “Guntyo” yang personalnya diangkat dari masyarakat pribumi (Simeulue). Di samping itu terdapat lagi seorang pembesar Jepang sebagai inspektorat pengawasan yang di sebut “Tyuzikikantyo” dan sehari-hari dipanggil dengan julukan “Tuan Besar” pada wilayah dahulu dimasa Belanda bernama *landschap* dinamai “son” yang dikepalai oleh “Sontyo” yang diangkat dari orang Indonesia asli.

Adapun yang menjadi pimpinan masing daerah (Son) tersebut pada masa itu adalah:

1. Tapah Son dipimpin oleh Sutan Keumala/Sutan Amin/Sutan Bustami
2. Simulul So dipimpin oleh T.Raja Mahmud/T.Raja Kahar
3. Salang So dipimpin oleh T. Hamzah
4. Sigulai Son dipimpin oleh T.M. Husen
5. Leukon Son dipimpin oleh T. Syamsuddin

Sebelum kedatangan Jepang di bentuk sebuah pemerintahan sementara disertai tugas oleh tentara Jepang yang datang dari Tapak Tuan dengan sebuah Kapal perangnya, pemerintahan sementara ini bekerja sekitar tiga bulan. Pasukan Jepang ini tinggal di Sinabang hanya beberapa jam. Setelah itu mereka kembali ke kapalnya dan meninggalkan Sinabang, tidak lama sesudah itu pesawat tentara sekutu sebanyak dua buah datang ke Sinabang dan mengadakan pemboman yang memakan korban harta benda dan penduduk yang berdosa sebanyak 20 orang.

Pada masa Jepang pulau Simeulue merupakan daerah militer dilihat dari jumlah personil pasukan yang ditempatkan. Mereka mendirikan sebuah resimen dengan membawahi beberapa batalion yaitu:

- Sinabang pusat pemerintahan Simeulue Gun terdiri dari 4 Batalion
- Lasikin sebagai markas besar terdiri dari 4 batalion
- Sibigo 1 Kompi
- Labuhan Bajau 1 Kompi

Disamping kekuatan sudah ada, maka dalam rangka memperkuat bala tentara Jepang, mereka mengumpulkan dan melatih para pemuda untuk di didik sebagai militer yang tergabung dalam kesatuan PETA seperti HEIHO, GYUGUN, KAYGUN dan TOKOBETSU.²⁵

Gambaran tersebut menunjukkan adanya perbedaan kebijakan Jepang dalam hal sosial ekonomi masyarakat dengan pemerintahan Belanda. Jepang dengan kondisi membutuhkan pasukan perang, sangat memerlukan masyarakat Simeulue untuk pertahanan dan semua kegiatan diarahkan dalam hal itu. Tenaga rakyat diperas untuk membangun kubu-kubu pertahanan tanpa memperhatikan kesehatan dan biaya hidupnya, demikian pula untuk pembangun-pembangunan lain yang diperlukan.

Perekonomian masyarakat Simeulue mengalami stagnasi, selain perdagangan antar pulau yang tidak lancar seperti sebelumnya, bahkan berhenti sama sekali, juga hasil pertanian utamanya, pangan tidak berhasil, dan sering pula hasil yang diperoleh penduduk diambil oleh tentara Jepang secara sewenang - wenang sehingga masyarakat sering 'mencuiri kepunyaan sendiri'.

Selama lebih tiga tahun Jepang di Simeulue, Ekonomi yang semrawut cukup membawa penderitaan bagi masyarakat, kehidupannya sangat memprihatinkan, kelaparan merajalela, bahan makanan pengganti seperti sagu berfungsi sekali untuk melindungi masyarakat dari kelaparan. Selain itu kebutuhan akan sandangpun terasa sulit, hal ini mendorong diantara penduduk ada yang masuk ke hutan mencari kulit kayu yang dapat difungsikan sebagai bahan pakaian, kulit kayu itu di pukul-pukul untuk ditipiskan, di rendam kemudian di jemur. Keadaan ini mendorong penduduk pendatang kembali ke kampungnya atau pindah ke daerah lain.

²⁵ Pemerintah Kabupaten Simeulue : 1996

KESIMPULAN

1. Pulau Simeulue sejak masa kolonial Belanda sudah ada sarana alat transportasi. Salah satu alat transportasi laut yang menghubungkan antar pulau. Sejak dulu hingga saat ini Pulau Simeulue transportasi laut masih sebagai alat transportasi andalan. Sedangkan transportasi darat masih sangat terbatas saat itu, terdapat 3 bus, dan 1 truk. Kendaraan ini digunakan untuk pengangkutan kopra trayek Salul - Sinabang, dan untuk pengangkutan penumpang.
2. Pada masa Kolonial Belanda di Sinabang sudah mulai dibangun sekolah lanjutan pemerintah dengan satu guru. Sekolah rakyat saat itu sudah dibangun di daerah Teupah di Sinabang, Lataling, Labuan baju, Lasihin dan Awe Sebal, Desa Ai, Kota Padang dan di daerah Sigulai di Lamameh. Pemerintah Kolonial Belanda mengangkat 11 guru di delapan sekolah rakyat, enam orang berasal dari pulau Simeulue, sisanya adalah keturunan melayu atau Aceh. Artinya lembaga pendidikan bercorak pendidikan barat sudah mulai berjalan.
3. Pulau Simeulue masa Kolonial Belanda sebagai daerah penghasil kayu, cengkeh dan kopra, sebagai produk unggulan hingga melakukan ekspor ke mancanegara. Pada masa tersebut juga sudah mulai dibangun perusahaan pengolahan kayu, pabrik kopra dan cengkeh. Pulau Simeulue saat itu menjadi sentral pengolahan kayu dan kopra sejak tahun 1917. Perdagangan kopra menjadi sumber penghasilan, perdagangannya berskala internasional, kopra di ekspor ke Penang (Malaysia).
4. Pada masa kolonial Jepang tidak jauh beda dengan pada masa kolonial Belanda, rakyat tetap dipaksakan untuk bekerja untuk kepentingan Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agur Azharuddin, dan Kawan-Kawan. 1996 “ *Bunga Rampai Sejarah Simeulue, Dalam Rangka Peresmian Kabupaten Simeulue Propinsi Daerah Istimewa Aceh* ” Kabupaten Simeulue-Sinabang.
- Abdullah Adnan. 1994. “ *Kebudayaan Suku-Suku Bangsa Di Daerah Aceh* ”, Penerbit; Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.
- A.A. Beekman, dkk. 1935. Diterjemahkan oleh Jefta Samuel “ *Simeulue Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda* ” Kota Sinabang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Aceh dan T4BS 1970 : 87, dan perasat 1983 : 19
Badan Pusat Stansitik Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh, Tahun 2010.
- Darmili Bupati Simuelue. 2010 “*Profil Kebudayaan dan Parawisata Simeulue Propinsi Aceh*” Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- Darmili Bupati Simeulue. 2007 “*Bunga Rampai Kabupaten Simeulue*” Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- Jurnal Haba. 2006. “ *Sejarah dan Budaya Suku Bangsa Simeulue* ” Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Jurnal Suwa. 2006. “*Gambaran Umum Kabupaten Simeulue*” Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Koentjaraningrat, 1984. “*Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*” Gramedia, Jakarta.
- Muhammad As’ad.. 1984. “*Kota Sinabang Studi Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Sejarah*” Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Darussalam-Banda Aceh.
- Pemerintah Kabupaten Simeulue : 1996
- Usman Abdul Rani DKK. 2009 “*Budaya Aceh*” Pemerintah Aceh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Banda Aceh.
- Usman, Rusdhi Sufi (1: 2012): “*Simeulue Dalam Lintasan Sejarah*”, Laporan Penerlitan kerjasama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Hal 36
- Rusdi Sufi, Iriani Dewi Wanti, Seno, Djuniat (1: 1997) ; Penerbit Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Wulan Juliani Sukmana, “ *Metode Penelitian Sejarah*”. Seri Publikasi Pembelajaran Vol 1 No 2(2021): Metode Penelitian, Hal 2